

**HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT SABU DI KABUPATEN
SUMBA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi Syarat-syarat
Guna Menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**



Oleh :

John Herman Pigalao, SH.

NIM : B4B 002.120

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

346.05
PIG
h e

**HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT SABU DI KABUPATEN
SUMBA TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR**

Tesis

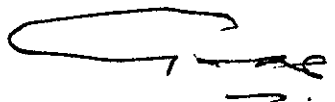
Oleh :

**John Herman Pigalao, SH.
NIM : B4B 002.120**

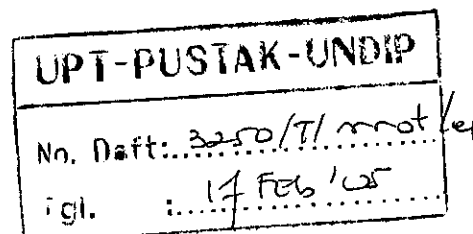
**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
pada tanggal 12 Oktober 2004**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui Pembimbing

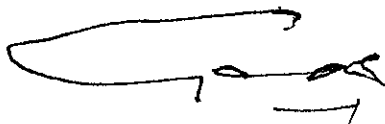


**Prof. IGN Sugangga, SH.
NIP. 130.350.063**



Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan



**Prof. IGN Sugangga, SH.
NIP. 130.350.063**

ABSTRAKSI

HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT SABU DI KABUPATEN SUMBA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh :

John Herman Pigalao, SH.

Masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu menganut sistem kekerabatan patrilineal dan sistem perkawinan eksogami dengan pembayaran uang jujur atau "kenoto" sehingga dalam sistem pewarisannya hanya anak laki-laki atau pihak laki-laki yang memiliki hak mewaris atau sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan bukan ahli waris.

Untuk mengetahui kenyataan atau keadaan sebenarnya dilingkungan masyarakat Sabu, maka penulis melakukan penelitian di kecamatan Kota Waingapu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji permasalahan-permasalahan pada ketentuan-ketentuan atau norma hukum yang berlaku dengan melakukan analisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif.

Tujuannya untuk mengetahui sistem pewarisan dan perkembangan serta cara penyelesaian bila terjadi perselisihan atau sengketa hak mewaris anak perempuan dalam hukum adat Sabu di kabupaten Sumba Timur.

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan dimana anak perempuan yang semula tidak memiliki hak mewaris, sekarang memiliki hak mewaris atau diakui sebagai ahli waris.

Perkembangan ini disebabkan oleh beberapa factor seperti migrasi, pendidikan, ekonomi serta agama.

Dalam hal timbulnya perselisihan atau sengketa akibat ketidakpuasan atas harta warisan, maka cara penyelesaian yang di tempuh dengan musyawarah dan mufakat keluarga, adat, dan penyelesaian perkara melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

ABSTRACT

DAUGHTER'S INHERITANCE SYSTEM AND ITS DEVELOPMENT AT SABU INHERITANCE LAW IN EAST SUMBA REGENCY NUSA TENGGARA TIMUR

By :
John Herman Pigalao, SH.

Sabu society at Waingapu subdistrict profess system of patrilineal genetic relationship and eksogami marriage with money payment (Kenoto"). Therefore in their inheritance system only son or man party deserves inheritance or can be admitted as heir, meanwhile daughter can not be heir.

In order to know fact or real condition in Sabu society environment, the writer carries out research at Kota Waingapu Subdistrict.

In this research, the writer uses empiris iuridis approach method. It is a method that studies problems on law norm stipulation. This method Prevails by doing qualitative analysis since collected data is descriptive.

Furthermore the aim of this research is to know inheritance system and to discover the solution to the dispute of dissatisfaction over daughter's heritage right in East Sumba Regency.

The result of this research indicates there is development in inheritance right. Daughter who didn't have inheritance right at the beginning, at now can be admitted as heir.

The development is caused by some factors which are migration, education, economy and religion.

In this case is heritage dispute, it can be overcome by holding cooperative discussion among family member or custom. Besides that problem can be solved in law manner by bringing accusation to court.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang memberikan petunjuk dan bimbingan serta penyertaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **“Hak Mewaris Anak Perempuan dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Sabu di Kabupaten Sumba Timur”**.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa dalam rangka penulisan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan, waktu dan tenaga, namun demikian dengan tekad serta keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas cakrawala berpikir akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan doa dan bimbingan berbagai pihak yang penulis terima dalam studi dan pada tahap penulisan tesis.

Rasa hormat dan terima kasih penulis ingin sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan membantu penulis saat penelitian dan penyelesaian tesis ini antara lain :

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH, selaku Ketua Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku dosen pembimbing dalam pembuatan tesis ini.
2. Ibu Hajjah Siti Sudaryatni, SH, MHum, yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penulisan tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Sukirno, SH, Msi, selaku Wali Studi yang telah memberikan dorongan semangat dan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian studi dan tesis ini,

5. Bapak Yunanto, SH, MHum, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Para Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat kepada kami.
7. Seluruh Staf pada Sekretariat Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang secara administrasi membantu kami didalam studi dan penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Marthen U.Z.Wolagole, SH, Camat Kota Waingapu yang telah memberikan waktu dan bahan-bahan serta masukan dalam pembuatan tesis ini.
9. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan staf yang memberikan masukan dalam pembuatan tesis ini.
10. Bapak Ketua Bappeda Kabupaten Sumba Timur dan staf.
11. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur.

12. Bapak Kepala Kesbanglimas Kabupaten Sumba Timur.
13. Bapak Dansianus Dule Riwu dan Bapak Ajub Pah selaku informan kunci dalam penulisan tesis ini.
14. Teman-teman pada Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, khususnya IGA Santi, Marius, Riana, Martha, Hanny, Retno dan teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Bapak Daud Kana Lulu dan keluarga atas dukungan dan doanya.
16. Bapak Daniel Livingstone Karel Haba dan keluarga atas bantuan dan doanya.
17. Bapak Jack Kira, SH, yang telah memberikan masukan dan bahan bagi penulisan tesis ini
18. Bapak Lucas, SH, CN dan Ibu Lennny Patricia Halim, SH, yang memberikan perhatian dan dorongan semangat untuk terus maju.

19. Opa Imanuel G. Toebe yang memberikan, perhatian dan motivasi serta nasihat untuk belajar.
20. Bapak dan Ibu Lukas Piga Lao - Martha Here, serta kakak, adik-adik yang senantiasa mendoakan demi keberhasilan penulis.
21. Bapak W. Musranto, yang mengarahkan dan selalu mendoakan demi keberhasilan penulis.
22. Istriku tercinta dr. Manggar Wangi, yang dengan setia dan penuh kesabaran mendampingi dan memberikan dorongan serta dukungan doa bagi keberhasilan penulis

Penulis menyadari sepenuh penulisan tesis ini jauh dari sempurna sehingga segala kritik, saran yang dapat menunjang penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan untuk kesempurnaannya.

Terima kasih.

Hormat saya

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRAC.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. PENGERTIAN HUKUM ADAT SECARA UMUM...	12
2.2. SISTEM KEKERABATAN/KEKELUARGAAN DALAM HUKUM ADAT	19
2.3. SISTEM PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT.....	22
2.4. UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM WARIS ADAT	25
2.4.1. Pewaris	25
2.4.2. Harta Warisan	28
2.4.3. Ahli Waris	32
2.4.4. Pelaksanaan / proses pembagian warisan.....	40
2.5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN DALAM HUKUM WARIS ADAT	45
2.3.1. Faktor Pendidikan.....	45
2.3.2. Faktor Perantauan / Migrasi.....	46
2.3.3. Faktor Ekonomi.....	46
2.3.4. Faktor Revolusi dan Perang.....	47
2.3.5. Yurisprudensi	47

BAB III	
METODE PENELITIAN.....	50
3.1. METODE PENDEKATAN.....	51
3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	51
3.3. POPULASI DAN TEHNIK SAMPLING	52
3.4. TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	53
3.5. ANALISA DATA.....	55
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	56
4.1.1. Lokasi Penelitian	57
4.1.1. Umum.....	57
4.1.2. Kependudukan	57
4.2. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU, KABUPATEN SUMBA TIMUR.	59
4.2.1 Sistem Kekerabatan dalam hukum adat Sabu.....	60
4.2.2. Sistem perkawinan dalam hukum adat Sabu	61
4.2.3 Sistem pewarisan dalam hukum adat Sabu.	65
4.3. UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM WARIS ADAT SABU DAN PERKEMBANGANNYA	71
4.3.1. Pewaris	71
4.3.2. Harta Warisan	75
4.3.3. Ahli Waris	80
4.3.4. Pelaksanaan / proses pembagian warisan.....	86
4.4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN DALAM HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN SABU DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU	91
4.4.1. Faktor Migrasi	92
4.4.2. Faktor Pendidikan	94
4.3.3. Faktor Ekonomi	95
4.3.4. Faktor Agama	96

4.4. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM WARIS ADAT MASYARAKAT SABU KECAMATAN KOTA WAINGAPU	98
---	----

4.4.1. Musyawarah Keluarga	98
----------------------------------	----

4.4.2. Musyawarah Adat	100
------------------------------	-----

4.4.3. Secara Pengajuan Gugatan ke Pengadilan	104
--	-----

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN	111
----------------------------	-----

5.1. KESIMPULAN	111
-----------------------	-----

5.2. SARAN	112
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BERLAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang memiliki perbedaan serta ada juga persamaannya. Demikian pula mengenai sistem kekerabatannya maupun sistem dan bentuk perkawinan serta ketentuan tentang sistem pewarisannya. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat secara turun temurun, yang merupakan hukum tidak tertulis. Hukum adat telah menyatu dalam hati sanubari anggota masyarakat yang tercermin dalam tata cara dan tingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakatnya. Secara khusus dalam kehidupan masyarakat Sabu hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis sangat tepat karena disana tidak dikenal budaya tulis, yang dikenal adalah "*budaya tutur*". Bahkan

sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ayub Pah¹, orang Sabu tidak boleh menulis daftar silsilah keturunannya, karena apabila dilakukan, orang tersebut akan meninggal dunia (= "*made atta*"). Dikalangan orang-orang Sabu pantangan ini masih saja dipercayai sehingga sangat sulit untuk mendapatkan buku atau tulisan yang menjelaskan silsilah orang Sabu secara lengkap, hal ini terjadi karena takut akan akibat tadi. Bahwa adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan sudah mendarah daging secara turun temurun, maka hukum adat dapat dikatakan bersifat tradisional. Selain itu hukum adat juga dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai kebudayaan.

Kebudayaan dan agama merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia. Hal itu juga sebagai akibat penjajahan bangsa Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, yang juga dengan sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi berbeda-

¹ Wawancara dengan Bapak Ayub Pah (Pemuka Adat Sabu) pada tanggal 14 Agustus 2004

beda golongan, suku bangsa dan juga bermacam-macam sistem hukum demikian pula terhadap sistem hukum adat dalam masyarakat Sabu.

Seperti ditulis oleh Nico L. Kana² pengaruh Belanda terhadap masyarakat Sabu sejak tahun 1756 yaitu pada saat pemerintah kolonial Belanda menanda tangani perjanjian dengan penguasa wilayah di pulau Sabu. Dimana Sabu diwajibkan menyediakan tentara bagi Belanda demi kepentingan Belanda di Kupang dan pada tahun 1838 dalam penghentian perdagangan budak oleh orang Ende di Sumba, relasi yang terjalin dengan pihak Belanda telah berpengaruh pada adat dan budaya orang Sabu.

Bahwa sampai sekarang ini di Indonesia belum ada ketentuan hukum waris yang bersifat nasional, tetapi yang masih berlaku adalah hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu³:

- (1) Hukum Waris Adat, untuk warga negara Indonesia asli.
- (2) Hukum Waris Islam, untuk warga negara Indonesia asli di berbagai daerah dan kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama Islam.

² Nico L. Kana, *Dunia Orang Sawu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hal. 19

³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, April 1981, Hal. 108.

(3) Hukum Waris Barat, untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat Sabu menganut sistem Patrilineal seperti yang berlaku pada masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu dan hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) menganut sistem Matrilineal. Perbedaan tersebut tentunya membawa konsekwensi hukum, didalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum yang mengandung suatu perintah ataupun larangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif.

Menurut R. Soepomo, pengertian Hukum Waris Adat adalah⁴ :

“Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya”

⁴ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 14.

tidak berhasil, ada pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur adalah sistem kekerabatan patrilineal, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Dalam hal ini kedudukan laki-laki dan perempuan dibedakan termasuk dalam hak mewaris. Tetapi tidak berarti dalam praktek sekarang anak-anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta peninggalan orangtuanya karena ada anak perempuan yang memperoleh warisan atau diakui sebagai ahli waris.

Dalam kehidupan masyarakat Sabu, pemuda dan pemudi yang mulai dewasa hal mana dapat dikenali dari ciri-ciri fisik atau cara berhiasnya yang disebut "*kepaŋ*", untuk anak perempuan yang siap kawin disebut *pana na'i* (= *panas tembakau artinya besar daya tariknya*)⁵ oleh orangtuanya dibuatkan rumah ("*leo*") yang agak terpencil dari rumah induk. Dengan begitu ia bebas

⁵ Kana, Nico L, op.cit. hal. 51

menerima lelaki yang mendatangnya artinya anak perempuan yang menentukan pilihan laki-laki mana yang disukainya.

Di rumah ini pergaulan di antara pemuda dan pemudi dapat mengantar ke terjadinya hubungan seks, cukup tersedia di Sabu.

Hal ini memungkinkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan memang dibolehkan. Dan anak-anak yang lahir di luar perkawinan disebut anak di rumah (=“*ana pa amu*”) atau anak yang jatuh di pokok (=“*ana do bui pa kepue*”) dan diberi nama belakang menurut nama ibunya (=“*ngara pa ina*”), maka kewargaan si anak adalah dalam kelompok dara amu ibunya disini haknya tidak berbeda dengan anak yang lahir oleh suami isteri yang sah perkawinannya. Karena kehadirannya dianggap memperbesar jumlah warga dan dengan begitu juga tenaga kerja yang ada dalam dara amu nya. Namun kelahiran anak tak berbapak ini tetap dianggap menyimpangi adat juga, sehingga mas kawin dalam perkawinan sang ibu ditambahkan dengan hewan penebus malu (=“*bada pehuru mea*”)

Penulis tertarik untuk meneliti tentang hak mewaris anak perempuan dan perkembangannya yang ada sekarang dalam hukum waris adat Sabu di kecamatan kota Waingapu, Kabupaten

Sumba Timur karena bagi anak perempuan dalam praktek dan kenyataannya mendapat bagian harta warisan atau dapat menjadi ahli waris.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana sistem pembagian warisan dan perkembangan hak mewaris anak perempuan pada masyarakat Sabu ditinjau dari Hukum Adat ?
- (2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak mewaris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Sabu ?
- (3) Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan, terutama yang menyangkut Hak Mewaris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Sabu, bagaimana cara penyelesaian yang sering ditempuh ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- (1) Untuk mengetahui sistem pembagian warisan dan perkembangannya dalam masyarakat adat Sabu di kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur.
- (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Sabu.
- (3) Untuk mengetahui bilamana terjadi sengketa dalam pembagian warisan terutama yang menyangkut Hak Mewaris anak perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Sabu, cara-cara penyelesaian apa yang sering ditempuh.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah :

- (1) Teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum waris adat, khususnya mengenai hak waris anak perempuan menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Sabu.
- (2) Praktis, yaitu dapat menjadi salah satu pemikiran yang bisa digunakan dalam praktek pembagian warisan yang terjadi di

masyarakat, terutama pada saat terjadinya sengketa pembagian warisan, dimana dapat dipergunakan untuk memutuskan perkara-perkara atau sengketa yang terjadi diantara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum adat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini sistematikanya diawali dengan **Bab I** sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Bab II akan membicarakan tinjauan umum tentang pewarisan berdasarkan hukum adat, khususnya akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan pewarisan menurut hukum adat, meliputi siapa sajakah ahli waris yang berhak mendapatkan pembagian warisan, harta warisan yang berupa apa sajakah yang boleh diwarisi dan bagaimana mengikatnya suatu adat istiadat secara turun temurun dalam masyarakat hukum adat.

Bab III akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan yang ditinjau dari hukum waris adat Sabu dan khususnya mengenai kedudukan anak perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat Sabu.

Bab V berupa penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN HUKUM ADAT SECARA UMUM

Keberadaan Hukum Adat di Indonesia sangat berpengaruh banyak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap individu bahkan sering merasakan suatu kebanggaan yang besar akan asal-usul daerah kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal. Seseorang bisa saja merasa bangga apabila mengakui berasal dari suku Jawa, Batak, Bali, Sabu, Sumba, dan sebagainya. Bahkan terkadang, walaupun individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya seseorang hidup di daerah perantauan masih memegang teguh adat dari negeri / sukunya, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai hal tersebut pada masing-masing suku di Indonesia, terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dari adat istiadat masing-masing.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa⁶ adanya hubungan/ susunan kekeluargaan adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam :

- a. Masalah perkawinan, agar dapat meyakinkan apakah ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami dan istri (misalnya hubungan keluarga terlalu dekat, adik-kakak-sekandung, dan sebagainya).
- b. Masalah warisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta warisan. Misalnya ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Jawa, akan tetapi sudah hidup merantau di Padang selama 15 tahun, pada saat ia akan menikah, sering dijumpai bahwa acara pernikahannya akan dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai adat Jawa. Hal ini menandakan bahwa ia masih memegang teguh adat istiadat kampung halamannya. Tidak jarang pula terjadi meskipun seorang laki-laki atau perempuan lahir dan besar di Padang, tapi ia masih merasakan ikatan darah Jawa yang kuat mengalir di dalam dirinya, dan hal ini merupakan suatu kebanggaan baginya. Maka pada saat prosesi pernikahan pastilah laki-laki

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 5.

atau perempuan tersebut meminta pernikahannya diselenggarakan menurut adat Jawa.

Sering dijumpai perkawinan yang diselenggarakan sesuai adat daerahnya masing-masing. Begitu pula halnya dalam hal pembagian warisan harta kekayaan, kita juga sering menjumpai warisan dibagi menurut adat daerahnya masing-masing.

Definisi Hukum Adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum ⁷:

Menurut C. Van Vollenhoven, orang pertama yang memperkenalkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat berkedudukan sejajar dengan hukum lainnya, maka hukum adat adalah

“aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan “adat”).”

Menurut Ter Haar, sebagai guru besar hukum adat yang pertama ketika Sekolah Tinggi Hukum didirikan di Jakarta pada tahun 1924, hukum adat adalah

“keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 25.

wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati."

Yang dimaksud fungsionaris hukum adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama dan para pejabat desa yang memberikan keputusan didalam dan diluar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Definisi Hukum Adat menurut A. Ridwan Halim adalah ⁸

"Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing".

Dalam masyarakat Indonesia terdapat 3 macam persekutuan hukum, yaitu ⁹:

1. Persekutuan hukum genealogis, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan dimana faktor keturunan (*genealogische factor*) merupakan hal yang penting sekali.

⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 9.

⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, Mei 1981, hal. 79.

2. Persekutuan hukum teritorial, dimana warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, dimana faktor teritorial (*territiale factor*) merupakan hal yang penting sekali.
3. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, dimana faktor genealogis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti.

Selain itu dalam hukum adat Indonesia mempunyai corak- corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain ¹⁰:

1. Keagamaan, dimana masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, dimana manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong-menolong, serta saling membantu satu sama lain.
3. Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak bersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.

¹⁰ Hilman Hadikusumo, Opcit, hal. 52-63

4. Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian “uang muka atau uang panjer” dalam hubungan hukum jual beli.
5. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
6. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
7. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan, tempat dan waktu.
8. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
9. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar, sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Akan tetapi jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat, maka akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

4. Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian “uang muka atau uang panjer” dalam hubungan hukum jual beli.
5. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
6. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
7. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan, tempat dan waktu.
8. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
9. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar, sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Akan tetapi jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat, maka akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

Didalam hukum adat terdapat banyak sekali bidang-bidang yang diatur secara adat, antara lain hukum perkawinan adat, hukum waris adat dan hukum perjanjian adat. Karena itu penulis berkehendak untuk membahas dan mengulas tentang hukum waris adat, khususnya tentang hukum waris adat Sabu.

Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah:

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa¹¹,

“Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Ter Haar menyatakan bahwa,

“Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.”

Menurut Iman Sudiyat¹² :

“Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.”

¹¹ Hilman Hadikusuma, *ibid.* hal.7.

¹² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 151.

Menurut IGN Sugangga bahwa¹³

“Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia”.

Azas-azas hukum waris adat adalah¹⁴ :

- (1) *Azas ketuhanan dan pengendalian diri,*
- (2) *Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak,*
- (3) *Azas kerukunan dan kekeluargaan,*
- (4) *Azas musyawarah dan mufakat,*
- (5) *Azas keadilan dan parimirma.*

Azas tersebut di atas banyak nampak dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap terjadinya sengketa dalam pemabagian warisan.

2.2. SISTEM KEKERABATAN / KEKELUARGAAN DALAM HUKUM ADAT

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang

¹³ IGN Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro Semarang, 1985 hal. 9

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, Hal. 21.

berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut Hukum Adat.

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu ¹⁵:

2.2.1. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Sabu, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram dan Irian.

¹⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hal. 49.

2.2.2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano.

2.2.3. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

2.3. SISTEM PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat¹⁶,
yaitu :

2.3.1. Sistem Pewarisan Individual

Ciri dari sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang yang bergaris keturunan /kekeluargaan secara parental/bilateral (garis keibu-bapaan). Karena tiap keluarga baru itu hidup dan berdiri sendiri dan bertanggungjawab kepada keluarganya yang utama. Fungsi warisan disini sebagai sebagai fondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup dan berkembangnya keluarga tersebut. Seperti pada keluarga-keluarga masyarakat suku Jawa lainnya yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal. 15-19.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti azas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya.

2.3.2. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri-ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” di Minangkabau atau “harta menyanak” di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orangtua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap

bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini sebelumnya dapat diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif adalah :

- Tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan dan rumah pusaka tersebut lambat laun menjadi lapuk dan rubuh.
- Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat disebabkan karena ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

2.3.3. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri-ciri sistem Pewarisan Mayorat adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Sabu, Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan

masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota keluarga ahli waris yang lainnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

2.4. UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM WARIS ADAT¹⁷

2.4.1. Pewaris

Orang mempunyai harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, Hal. 26-30.

diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis pewaris adalah:

1. Pewaris Laki-laki (Ayah)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Sabu, Bali, Batak, Lampung, dan lain-lain. Dapat dibedakan menjadi :

1.1. Pewaris pusaka tinggi

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. Dapat dibedakan menjadi :

(1) Pewaris mayorat laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

(2) Pewaris kolektif laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Sabu, Bali dan Batak, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

1.2. Pewaris pusaka rendah

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

2. Pewaris Perempuan (Ibu)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan, yaitu ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (masyarakat matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya, misalnya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

3. Pewaris Orangtua (Ayah dan Ibu)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental). Begitu pula halnya macam harta dan asal-usul harta warisan itu, mempengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia sudah meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama ataukah masih bersifat harta pusaka atau harta bawaan. Jika harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta pencaharian suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

2.4.2. Harta Warisan¹⁸

Merupakan harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Jenis-jenis harta warisan adalah :

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 36-43.

1. Kedudukan / jabatan Adat

Merupakan warisan yang tidak berwujud benda, dan hal ini bersifat turun-temurun. Misalnya Raja-raja adat di Batak; Ratu Mone Pidu di Sabu, Penghulu Suku, Penghulu Andiko atau Mamak Kepala Waris di Minangkabau; dan lain-lain.

Pada masyarakat patrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh keturunan laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua. Pewaris kedudukan/jabatan adat tersebut di Sabu tidak boleh diteruskan kepada anak perempuan.

Pada masyarakat matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh saudara laki-laki sulung atau yang cakap dari seketurunan perempuan dari pewaris. Yang termasuk dalam warisan kedudukan/ jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunan.

2. Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur/dilihat dari asal-usul harta tersebut, yaitu :

2.1. Harta Pusaka Tinggi

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, benda bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, dari zaman nenek moyang dan paling rendah dari zaman buyut/canggah.

2.2. Harta Pusaka Rendah

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu, dan kebanyakan juga sudah

tidak lagi terletak di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman yang sudah jauh atau di perantauan.

3. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak, mungkin berasal dari bagian harta pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat masing-masing suami atau istri, bisa juga berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya, yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan mereka.

Pada masyarakat patrilineal yang melaksanakan perkawinan jujur, istri ikut dan tunduk pada hukum kekerabatan suaminya, maka yang disebut harta bawaan adalah barang-barang yang dibawa oleh istri, sedangkan barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya adalah harta penunggu atau harta penantian suami.

4. Harta Pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan mereka, yang termasuk dalam harta pencaharian, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerjasama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi juga termasuk pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

2.4.3. Ahli Waris¹⁹

Semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk pembayaran uang jujur (patrilokal) atau tanpa

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 63-144.

pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

1. Ahli Waris dalam Masyarakat Patrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dapat dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya; atau dapat juga karena ia sebagai anak perempuan yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki (pengganti) dengan melakukan perkawinan “ambil pria”.

1.1. Anak laki-laki sulung

Pada masyarakat patrilineal, anak laki-laki sulung menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Akan tetapi jika anak sulung tersebut pergi merantau atau tidak bersedia mengurusnya, maka yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

1.2. Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orangtuanya, baik menurut adat maupun menurut agama yang dianut masyarakat setempat. Anak laki-laki tersebut termasuk keturunannya (cucu-cucu si pewaris).

1.3. Anak perempuan

Pada dasarnya di kalangan masyarakat **patrilineal** anak perempuan **bukan ahli waris**, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan putus keturunan (tidak mempunyai anak laki-laki).

1.4. Anak tidak sah

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak di kalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

1.5. Anak angkat

Merupakan anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak.

1.6. Anak tiri

Anak yang lahir dari istri yang sebelumnya berstatus janda, yang sudah mempunyai anak pada perkawinannya yang terdahulu dan kemudian menikah lagi dengan membawa anak kedalam perkawinannya yang selanjutnya.

Pada umumnya di kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, anak tiri tersebut bukanlah ahli waris dari bapak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya.

1.7. Ahli waris dengan hibah wasiat

Dimana seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan untuk mendapatkannya karena adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang keturunannya rendah, atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Pesan atau amanah dalam hibah wasiat ini dapat dibuat dengan tertulis atau hanya diucapkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditentukannya, dengan disaksikan oleh beberapa anggota keluarganya, terutama para ahli warisnya yang lain.

Dalam masyarakat adat Sabu dikenal adanya wasiat dengan istilah "*pe taka li*" (=menyimpan pesan) yang biasanya disampaikan kepada tua-tua adat dari lingkungan kekerabatannya.

1.8. Janda

Pada umumnya di lingkungan masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, janda yang ditinggal wafat suaminya, **bukan ahli waris** dari almarhum suaminya, tetapi selama janda tersebut mematuhi adat di pihak keluarga suami dan bertempat tinggal di kediaman/tempat pihak keluarga suaminya, ia tetap berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta warisan suaminya, yang bukan dalam bentuk kedudukan/jabatan adat, untuk keperluan hidup janda tersebut dan anak-anak dari almarhum suaminya, dan kemudian harta warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada anak laki-lakinya. Bila anak-anaknya belum dewasa, dalam pengurusan harta warisan tersebut didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya atau penggantinya yang masih hidup.

2. Ahli Waris dalam Masyarakat Matrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal berbeda dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal. Jadi para ahli waris perempuan dalam menguasai dan mengatur harta warisan tidak sendiri, melainkan didampingi oleh saudara laki-lakinya.

2.1. Anak perempuan sulung

Seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan yang menganut sistem pewarisan mayorat perempuan, anak perempuan sulung berkedudukan sebagai “tunggu tubang” (penunggu harta) dari semua harta warisan orangtuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Didalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, ia didampingi oleh saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut “Payung Jurai” (pelindung keturunan), fungsinya yang utama adalah sebagai pengganti dari ibunya yang sudah tua atau sudah meninggal dunia,

untuk mengurus dan memelihara adik laki-laki dan perempuan sampai mereka dewasa dan berumah tangga.

2.2. Anak perempuan yang bukan sulung

Seperti yang berlaku di Minangkabau yang menganut sistem pewarisan kolektif perempuan terhadap harta pusaka, maka semua anak perempuan yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur oleh “mamak kepala waris”. Para ahli waris perempuan, boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah, sawah atau rumah gadang, secara bersama-sama di bawah pengawasan “Mamak Kepala Waris”

2.3. Anak laki-laki

Anak laki-laki mempunyai kemungkinan berkedudukan sebagai ahli waris, apabila salah satu dari mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan, jadi kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan. Menurut Ter Haar, perkawinan seperti

ini pernah terjadi di perbatasan antara daerah Minangkabau dan daerah Mandailing (Tapanuli Selatan), dimana suatu keluarga Minang yang tidak mempunyai keturunan anak perempuan melaksanakan perkawinan jujur dan mengambil gadis Mandailing dan menetapkan anak perempuan yang akan lahir dari perkawinan ini menjadi ahli waris bagi keluarga yang putus keturunan itu.

3. Ahli Waris dalam Masyarakat Parental

Pada dasarnya ahli waris tidak dibedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka masing-masing berhak mendapat bagian warisan dari orangtuanya, baik terhadap harta warisan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian (harta bersama) orangtua semasa hidup mereka. Oleh karena itu, cenderung dilakukan sistem pewarisan secara individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Sistem parental/bilateral ini, banyak dianut oleh masyarakat adat Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan karena adanya perkembangan

zaman yang semakin modern, sistem parental/bilateral sudah dianut oleh banyak keluarga-keluarga lainnya, yang berlatar belakang kemasyarakatan patrilineal atau matrilineal.

2.4.4. Pelaksanaan / proses pembagian warisan

1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia / Masih Hidup

1.1. Cara Penerusan atau Pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup seringkali pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat. Misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Pulau Sabu.

Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin.

1.2 Cara Penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu,

dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

1.3. Cara Meninggalkan Pesan atau Wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan dan memang dalam masyarakat Sabu sangat diutamakan karena tidak dikenal budaya tulis, pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau akan pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau dituliskan dengan jelas dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tokoh-tokoh desa atau pamong desa.

1.4. Penetapan Harta Kekayaan semasa pewaris masih hidup dapat berupa²⁰:

- Pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris.

Contoh : pewaris dengan dasar tulus ikhlas memberikan kepada anak/ istri/ anak angkat sewaktu mereka masih

²⁰ IGN Sugangga, op.cit. hal. 54.

hidup berkumpul. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya (hibah).

2. Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul persoalan apakah harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut :

2.1. Penguasaan Janda

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan mereka, dapat dikuasai oleh janda almarhum, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

2.2. Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta

warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

2.3. Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris, bila sudah tidak ada lagi maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

2.4 Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi, misalnya keris pusaka, tombak, pedang, jimat dan lain-lain.

Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapanakah waktu pembagiannya

dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan, sebagai berikut :

3. Waktu Pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, akan tetapi menurut adat kebiasaan waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap **pewaris yang meninggal dilakukan.**

4. Juru Bagi

Juru bagi biasanya merupakan anggota keluarga/ kerabat, yaitu :

- a. Orangtua yang masih hidup
- b. Janda atau duda pewaris
- c. Anak laki-laki atau perempuan tertua
- d. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- e. Anggota kerabat tetangga, pemuka/tokoh masyarakat yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

5. Cara Pembagian

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan sifat dari benda atau harta warisan, pada umumnya barang-barang milik perempuan akan diberikan kepada anak perempuan artinya sesuai kebutuhan dari para ahli waris.

2.5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN DALAM HUKUM WARIS ADAT

2.5.1. Faktor Pendidikan²¹

Pendidikan membawa akibat manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya, menjadi lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak, sehingga berkuranglah sifat berfikir spekulatif atau menyerah kepada keadaan. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Sabu, yang dulunya hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem patrilineal), maka secara berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan, maka bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama

²¹ Bushar Muhammad, *Opcit*, Hal. 128.

rata (parental). Hal ini sangat berperan terhadap pola pikir dan tindakan yang diambil oleh masyarakat Sabu yang berada di kecamatan kota Waingapu.

2.5.2. Faktor Perantauan / Migrasi

Adanya perpindahan penduduk atau orang-orang dari daerah asal dan terisolasi ke tempat-tempat yang lebih terjamin bagi kelangsungan hidupnya. Akan cenderung meninggalkan tata cara dan sifat hidup yang kiranya kurang baik dari daerah asalnya serta beralih ke sifat hidup yang lebih baik di daerah perantauan misalnya di daerah asal, hukum warisnya berdasarkan sistem patrilineal, sedangkan di daerah perantauan informasi dan pengetahuan serta pengaruh hukum modern dan gerakan feminisme telah merombak keberpihakan yang selama ini mengunggulkan kaum lelaki. Hukum modern yang egaliter dan non diskriminasi dalam hal gender, ia akan cenderung mengikuti sistem pewarisan yang memberikan kedudukan yang sama kepada anak perempuan seperti hukum waris berdasarkan sistem parental.

2.5.3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam arti luas termasuk pula di dalamnya faktor industrialisasi. Pada hakekatnya erat pula hubungannya

dengan perkembangan di lapangan teknologi dan perkembangan kota-kota besar, semua menunjukkan dan membawa tenaga-tenaga di dalam masyarakat dan alam, sama-sama menuju kepada suatu susunan ekonomi yang melipatgandakan hasil produksi di segala sektor. Semuanya mempengaruhi relasi antar individu manusia dalam masyarakat, yaitu lebih rasional, berdasarkan perhitungan untung dan rugi.

2.5.4. Faktor Revolusi dan Perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, yang membawa akibat perubahan kepada cara-cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas dan lain-lain, lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan rohani, sehingga kemudian timbul persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (bilateral).

2.5.5. Yurisprudensi²²

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para

²² M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 24-38.

pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Harapannya adalah perselisihan tersebut berhasil diselesaikan secara damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh seperti sedia kala. Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara musyawarah, bagi musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua-tua/tokoh-tokoh adat. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan damai di muka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan. Konsekwensinya bagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung, dalam mencari solusi bagi penyelesaian sengketa warisan adat. Kemudian timbullah berbagai macam yurisprudensi, sebagai solusi dari sengketa warisan adat tersebut.

Salah satu yurisprudensi mahkamah agung yang terkenal dalam hal sengketa warisan adat adalah : Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yang

berbunyi : Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo, bahwa *anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan* (huruf tebal oleh penulis).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian terhadap suatu ilmu, metode penelitiannya harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya. Misalnya metode penelitian terhadap ilmu-ilmu pasti berbeda dengan metode penelitian terhadap ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu maka suatu penelitian hukum akan mempunyai suatu ciri-ciri yang khas bila dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya.

Penelitian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi ²³:

Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, Penelitian Hukum Normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris terutama meneliti dengan menggunakan data primer.

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkap suatu kebenaran. Dengan pedoman ini seorang ilmuwan akan dapat mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Didalam mengadakan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut :

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 9.

3.1. METODE PENDEKATAN

Permasalahan yang akan diteliti adalah masalah mengenai adanya kaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris mengenai “Hak Mewaris Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris Adat Sabu di Kabupaten Sumba Timur”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu suatu metode yang mengkaji permasalahan pada ketentuan-ketentuan atau norma hukum yang berlaku dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris mempergunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau responden yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pergeseran nilai hukum adat dalam kedudukan hak mewaris pada anak perempuan Sabu di kecamatan kota Waingapu.

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini untuk memberikan deskripsi mengenai kedudukan perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat Sabu, khususnya tentang adanya perkembangan yang telah menyebabkan perbedaan pembagian harta warisan bagi perempuan di zaman

dahulu dengan keadaan zaman sekarang. Selain itu juga dilakukan analisis baik dari aspek yuridis maupun aspek empirisnya.

3.3. POPULASI DAN TEKNIK SAMPLING

Populasi adalah *seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti*²⁴. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi tersebut, maka cukup diambil sebagian saja untuk dapat diteliti sebagai sampel.

Populasi di dalam penelitian ini adalah orang-orang Sabu, di kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur. Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik yang biasa dipakai karena alasan biaya, waktu dan tenaga, maka tidak mengambil sejumlah besar sampel. Mardalis dalam bukunya mengemukakan bahwa²⁵ :

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, Hal. 44.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Hal. 58.

“Penggunaan teknik Purposive Sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya”.

Cara pengambilan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi informan kunci (key informan), yaitu pemuka adat Sabu, yang mengetahui hukum waris adat Sabu dan hakim, aparat kecamatan dan kelurahan yang mengetahui tentang perselisihan dan sengketa warisan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian melacak informan/responden lain dapat memberikan data dan informasi yang berguna untuk melengkapi data yang diperlukan untuk penulisan tesis ini yaitu ana-anak perempuan Sabu yang dalam praktek atau kenyataannya memperoleh tanah warisan.

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut :

Data Primer

Pengumpulan data primer yaitu data yang langsung didapat dalam penelitian lapangan, dengan cara :

1. Mengadakan wawancara terstruktur, kepada para pemuka adat Sabu, menyangkut hukum waris adat Sabu yang berlaku di zaman dahulu sampai pada perkembangannya sekarang ini, cara penyelesaian sengketa, cara pembagian warisan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak waris bagi perempuan.
2. Mengadakan wawancara terstruktur dengan hakim, aparat kecamatan dan kelurahan yang pernah menangani perkara sengketa warisan di pengadilan maupun diluar pengadilan. Kemudian kepada anak-anak perempuan yang bersengketa dan yang menerima warisan atau sebagai ahli waris di kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur guna memperoleh keterangan yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara :

1. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum waris adat, serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.
2. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum waris

adat Sabu, juga terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang ada yang berkaitan dengan hukum waris adat.

3.5. ANALISA DATA

Setelah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sejak dulu, beserta kaitannya dengan peraturan yang berlaku sekarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bulan selanjut penulis melakukan pembahasan serta analisa. Agar supaya pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- 4.1. Gambaran umum lokasi penelitian.
- 4.2. Hak mewaris anak perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat Sabu di kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur
- 4.3. Unsur-unsur dalam hukum waris adat Sabu dan perkembangannya.
- 4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dalam hak mewaris anak perempuan Sabu di kecamatan kota Waingapu.
- 4.5. Penyelesaian Sengketa warisan dalam masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN²⁶

Bahwa penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur tentang Hak mewaris anak perempuan dan perkembangannya menurut hukum waris ada Sabu. Selanjutnya penulis akan memaparkan gambaran umum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

4.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di :

Kecamatan : Kota Waingapu

Kabupaten : Sumba Timur

Propinsi : Nusa Tenggara Timur

4.1.2. Umum

Kecamatan kota Waingapu terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1992 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan yang saat ini telah definitif dengan luas wilayah 4.430 hektare. Kecamatan adalah sub bagian administratif dari Kabupaten yang dikepalai oleh Camat yang pegawai negeri.

Kecamatan kota Waingapu berbatasan dengan :

²⁶ M.U.Z. Wolagole, SH, Msi, Kecamatan Kota Waingapu Dalam Angka 2002

Sebelah Utara dengan laut Sabu

Sebelah Selatan dengan kecamatan Pandawai

Sebelah Timur dengan kecamatan Pandawai

Sebelah Barat dengan kecamatan Pandawai dan Haharu

4.1.3. Kependudukan

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk dirinci per Kelurahan 2002

No.	Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km)	Kepadatan Penduduk /km
1	Malumbi	1.715	11,2	153
2	Lambanapu	2.497	6,9	362
3	Mauliru	3.272	5,8	564
4	Mauhau	1.475	1,5	983
5	Kambaniru	4.987	1,8	2.270
6	Prailiu	6.606	5,3	1.246
7	Wangga	3.857	4,1	941
8	Kamalaputi	6.113	1,2	5.094
9	Matawai	3.646	1,4	2.604
10	Hambala	5.521	2,4	2.300
11	Kambajawa	7.261	2,7	2.689

Sumber data : BPS Kabupaten Sumba Timur tahun 2002

Tabel 2 Banyaknya Penduduk menurut Suku di kecamatan kota Waingapu

No.	Suku Sumba	Suku Sabu	Suku Jawa	Suku Flores/ Ende	Suku Rote Alor	Suku2 lainnya	Jumlah
1	26.327	10.420	1.419	2.440	926	4.967	46.499

Sumber data : BPS Kabupaten Sumba Timur tahun 2000

Tabel 3 Banyaknya Penduduk menurut tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	TT SD	SD	SLTP	SLTA	DI - DIII	UNIVTAS	Jumlah
Jumlah	15.043	10.260	6.812	7.789	618	834	41.360

Sumber data : BPS Kabupaten Sumba Timur tahun 2000

Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Agama / Kelurahan di kecamatan kota Waingapu tahun 2002

No.	Kelurahan	Kristen Protestan	Islam	Hindu/ Budha	Khatolik	Lain-lain/ Marapu
1	Malumbi	1.541	-	-	54	122
2	Lambanapu	1.387	92	-	884	134
3	Mauliru	2.339	6	-	513	414
4	Mauhau	1.335	72	-	54	14
5	Kambaniru	4.761	19	-	196	11
6	Prailiu	5.961	434	34	145	32
7	Wangga	3.466	122	-	253	16
8	Kamalaputi	3.814	1.948	34	296	21
9	Matawai	1.813	1.278	47	508	-
10	Hambala	3.086	1.932	46	457	-
11	Kambajawa	5.119	812	-	1.294	36
	Jumlah	34.662	6.715	181	4.652	800

Sumber data : BPS Kabupaten Sumba Timur tahun 2002

4.2. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU, KABUPATEN SUMBA TIMUR.

Hukum adat sebagai bagian dari hukum adat sebagian besar terdiri dari ketetapan-ketetapan yang tidak tertulis (=uku rai”),

mempunyai sifat dinamis, artinya mudah berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Tugas utama dari hukum adat adalah mengayomi serta memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

4.2.1. Sistem kekerabatan dalam hukum adat Sabu.

Untuk memahami sistem pewarisan menurut hukum adat Sabu, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang sistem kekerabatannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat adat di kecamatan kota Waingapu, menurut Bapak Manutede²⁷, Masyarakat Sabu di sana masih menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu masyarakat hukum, yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga akhir dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Adapun konsekwensi hukum dari sistem patrilineal ini anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan pembayaran jujur akan masuk menjadi keluarga suaminya atau memakai nama bapaknya "*ngara pa ama*" dan dalam hal pembagian warisan hanya anak laki-laki yang mendapat warisan dengan bagian sesuai kesepakatan keluarga.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Manutede, Pemuka Adat Sabu, tanggal 18 Agustus 2004

4.2.2. Sistem perkawinan dalam hukum adat Sabu

Sistem perkawinan dalam masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu sistem perkawinan eksogami dimana laki-laki mencari perempuan dari luar kerabatnya. Dalam kehidupan masyarakat adat Sabu “perkawinan adalah aliansi pranata yang menghubungkan dua kelompok-kelompok dari masing-masing anggota pasangan tersebut”²⁸.

Bentuk perkawinannya dengan pembayaran uang jujur (=“*kenoto*”, sampai saat ini masih dipegang teguh dan disana dikenal dengan istilah mengantar sirih pinang. Dengan diterimanya sirih dan pinang juga uang sebagai “*Thi kenoto*” (termasuk uang dan benda lainnya serta hewan) oleh pihak keluarga perempuan, berarti setelah upacara perkawinan dilaksanakan anak perempuan akan keluar (eksogami) dari perlindungan kerabat patrilinealnya dan beralih kedudukannya masuk ke dalam perlindungan kekerabatan patrilineal suaminya. Selama istri terikat dalam perkawinan istri wajib mengikatkan diri pada aliansi dan berada dalam perlindungan di pihak suaminya,

²⁸ Kana, Nico L. op.cit. hal. 130.

baik secara pribadi maupun harta benda yang dibawanya masuk ke dalam perkawinan dan tunduk kepada hukum adat kekerabatan patrilineal suaminya, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut harta bawaan istri. Istri dalam melakukan perbuatan hukum harus atas persetujuan suaminya atau kerabat patrilineal suaminya.

Hasil Penelitian

Konsekwensi bentuk perkawinan dengan kenoto dan sistem kekerabatan patrilineal maka anak laki-laki yang merupakan penerus generasi dan diakui selaku ahli waris. Di kecamatan kota Waingapu perkawinan menurut adat Sabu, pembayaran uang jujur tidak berarti anak perempuan masuk dalam kerabat patrilineal suami dan putuslah hubungan dengan keluarga patrilineal asalnya. Nico L. Kana menyatakan ²⁹*“Meskipun orang Sabu mengikuti garis patrilineal yang antara lain berarti bahwa si istri digolongkan menjadi warga klan suaminya, tetapi perlakuan yang menyimpang terhadap keluarga pihak perempuan (lebih lagi jika kedudukan dan peranan sebagai isteri/pengurus rumah*

²⁹ Kana, Nico L. *ibid.* hal.25

tangga tidak diberikan oleh suami) dapat berakibat pihak warga perempuan akan mengambil kembali anaknya.

Uraian di atas dapat dipertegas dengan hasil penelitian yang diperoleh pada suatu upacara perkawinan adat dalam acara peminangan yang penulis hadiri. Pada saat peminangan Uang jujur / Ihi kenoto dikatakan belum lengkap (=”tobo”), akibatnya orangtua dan pihak keluarga calon suami akan bangun berdiri dari tempat duduknya lalu mencium juru bicara *”mone uba”* dan keluarga dari pihak calon istri sebagai tanda pemenuhan uang jujur. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu aliansi, dimana kedudukan pihak keluarga perempuan lebih superior saat berhadapan dengan pihak keluarga laki-laki.

Pemuka adat Sabu³⁰ yang menjadi jurubicara pihak keluarga perempuan memberikan penjelasan bahwa tindakan memberikan ciuman mengandung pesan jika kedudukan dan peranan sebagai isteri/pengurus rumah tangga tidak diberikan oleh suami maka isteri dapat diambil kembali oleh pihak keluarga isteri dengan alasan “tidak dibeli dengan abu dari telapak kakinya” (*”ado do welli hari nga awu nga ti kaba jalla”*).

³⁰ Wawancara dengan Ama Pana Gili, Pemuka Adat Sabu, tanggal 19 Agustus 2004

Dalam suatu perkawinan dilingkungan masyarakat adat Sabu hal yang berkaitan dengan harta warisan adalah pemberian harta kekayaan semasa orangtua (pewaris) masih hidup kepada anak perempuan. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Semua pemberian seperti ini tidak diperhitungkan kemudian, karena pada prinsipnya anak perempuan bukan ahli waris. Pemberian ini sebagai pemberian lepas dan bersifat tulus ikhlas. Dalam ketetapan adat Sabu adalah benda-benda yang dipakai oleh perempuan diberikan kepada perempuan dan ini tidak menjadi keharusan untuk diberikan kepada anak-anaknya perempuan termasuk menantu perempuan dan kepada siapa saja yang dianggap pantas untuk menerimanya.

Analisa

Masyarakat Sabu yang menganut sistim kekerabatan patrilineal dan sistem perkawinan eksogami serta bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Konsekwensinya anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Hal ini dipertegas oleh sifat pemberian kepada anak perempuan pada saat kawin merupakan pemberian lepas yang tidak diperhitungkan sebagai harta warisan. Setelah pewaris meninggal maka harta

warisan berupa sawah, tanah, kumpulan pohon lontar dan hewan piaraan yang ada akan jatuh ketangan anak laki-laki. Harta-harta ini dapat dikategorikan sebagai harta pusaka rendah yang dapat dibagi-bagi. Menurut penulis harta pusaka ini saat ini semakin tidak dikenal karena selalu dibagi-dibagi dan kemudian menjadi harta bawaan kedalam perkawinan, yang kemudian diwariskan kepada anak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan benda-benda seperti perhiasan emas dan /atau perak dan peralatan tenun dan benda lain, yang sifatnya dan peruntukkan dipakai oleh perempuan akan jatuh kepada perempuan bisa kepada anaknya atau saudara perempuan ataupun menantu perempuan. Menurut penulis yang diperoleh anak perempuan sebagai warisan oleh anak perempuan menurut hukum waris adat Sabu yang asli adalah "*hak perlindungan*" dari kerabat patrilinealnya dimana ia berada.

4.2.3 Sistem pewarisan dalam masyarakat Sabu.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Sabu erat kaitannya dengan sistem kekerabatan dan sistem serta bentuk perkawinannya seperti telah diuraikan di atas. Dalam hal sistem pewarisan dan harta warisan tidak terlepas dari adanya pengaruh

lingkungan, walaupun harta warisan itu merupakan milik pribadi atau persekutuan hukum, namun proses pewarisan itu tidak selalu berlangsung atas kehendak bebas pewaris semata-mata tanpa memperhatikan hukum warisnya. Karena terdapat pembatasan-pembatasan tertentu seperti pembatasan dari persekutuan adat sehubungan dengan haknya jika warisan itu milik persekutuan adat. Juga pembatasan oleh karena menganut sistim kekerabatan patrilineal dan bentuk perkawinan serta oleh karena sifat harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi atau dapat dibagi-bagi. Dalam hukum adat Sabu yang asli dikenal sistem pewarisan bersama dan sistem pewarisan mayorat.

Hasil Penelitian

Sistem pewarisan menurut hukum adat Sabu di kecamatan kota Waingapu tentunya telah dipengaruhi pula oleh keadaan dan kenyataan bahwa orang-orang Sabu hidup bukan di tanah leluhurnya. Artinya mereka tidak memiliki tanah yang disebut sebagai tanah milik persekutuan adat (= "*rai udu kerogo*") yang diwarisi secara kolektif /bersama-sama. Adapun tanah yang dimiliki oleh orang-orang Sabu adalah merupakan tanah hasil perolehan sendiri "*rai awi kebaha miha*" dan tanah-tanah yang

diperoleh karena jasa-jasa mereka “*rai awi*” (*penghargaan karena jasa menghentikan kebiasaan orang Ende menyerang Sumba dan untuk mendapatkan budak*)³¹. Artinya tanah-tanah ini merupakan milik pribadi yang dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Disini nampak bahwa faktor migrasi yaitu berpindahnya orang Sabu dari pulau Sabu ke pulau Sumba dan menetap disana telah pula mempengaruhi sistem pewarisannya. Di Sumba ada diantara mereka yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah pada tahun 1877³². Kemajuan dibidang pendidikan pada masyarakat Sabu turut mempengaruhi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka atas harta benda yang mereka miliki. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan sebagai tentara, guru, pendeta serta sebagai pegawai administrasi sejak zaman kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Akibat kemajuan dibidang pendidikan ini turut berpengaruh terhadap pola hubungan kekerabatan yang semakin longgar semakin mempertebal sifat individualis dalam kehidupan sehari-harinya. Kecuali dalam hal kematian seperti hasil penelitian Cornelis Lay “*Mendatangi rumah duka adalah kewajiban bagi setiap orang Sabu. Bahkan*

³¹ Wawancara dengan Bapak Dule Riwu, Pemuka Adat Sabu, tanggal 19 Agustus 2004

³² Oe.H.Kapita, Sumba Di Dalam Jangkauan Jaman, hal. 38

*orang-orang yang seumur hidup tidak saling menyapa tetap diikat oleh kewajiban kultural ini*³³.

Keadaan seperti disebutkan di atas telah membawa pengaruh terhadap sistem pewarisan dalam hukum waris adat Sabu. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa tidak sulit untuk menemukan komunitas anak perempuan Sabu yang saat ini telah memanggul hak dan kehormatan selaku ahli waris. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap ketetapan adat Sabu yang asli. Namun dilingkungan masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu sendiri terutama yang berpendidikan tidak muncul penolakan. Dengan demikian praktek pewarisan mengakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam perkembangannya sampai saat ini dapat diterima.

Problemnya adalah pergeseran atau perubahan tersebut belum dipraktekkan secara luas dan merata oleh dan diantara pendukung adat Sabu tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari muncul pembatalan (anulisasi) terhadap pewarisan yang sudah terjadi. Untuk itulah hukum tertulis / positif harus diperankan sebagai sarana yang mengesahkan peristiwa pewarisan yang telah dan

³³ Cornelis Lay, Kisah Dari Kampung, hal 145

sedang berlangsung dari pewaris kepada ahli waris anak perempuan. Dalam konteks seperti inilah profesi Notaris / PPAT memperoleh makna penting.

Responden ahliwaris Dina, anak tunggal perempuan memperoleh warisan peninggalan orangtuanya berupa tanah, rumah dan benda bergerak lainnya. Ia menyadari bahwa menurut hukum adat Sabu seharusnya bila kemudian kawin, semua harta tersebut akan jatuh ketangan saudara laki-laki dari ayahnya atau anak-anaknya. Tetapi saudara laki-laki ayahnya tidak melakukan, dengan memberikan alasan bahwa harta warisan ini adalah hasil kerja keras ayahnya dan sepantasnya jatuh kepada anak perempuannya. Ia sebagai kerabat terdekat dapat menerimanya karena menurut mereka di Sumba bukanlah tanah milik kerabat sehingga yang berhak adalah anak pewaris. Kenyataan kewajiban untuk memberikan perlindungan yang ditetapkan adat tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada situasi dan perkembangan sekarang ini³⁴.

Demikian pula yang dialami oleh responden Wila Ju, walaupun pemecahan warisan itu terjadi setelah pewaris meninggal dunia,

³⁴ Wawancara dengan Ina Dina, Ahli waris perempuan pada tanggal 16 Agustus 2004

maka anak perempuanpun diikut sertakan dan diperhitungkan sebagai penerima warisan. Ibu wila Dju menerima warisan setelah bapak dan ibunya meninggal dunia bersama-sama dengan ahli waris lainnya (saudara laki-laki). Harta warisan berupa tanah yang pembagiannya telah ditentukan oleh orangtuanya semasa masih hidup³⁵.

Menurut responden Bapak Lowe Here³⁶, didalam keluarga ini ada seorang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, karena anak laki-laki (sulung) tinggal di Surabaya, maka harta kekayaan warisan orangtuanya dikelola oleh adik perempuan (anak kedua), hasil yang diperoleh dari harta warisan ini dipakai untuk keperluan hidup dari saudara-saudara perempuannya. Setelah saudara laki-lakinya kembali ke Waingapu, maka harta warisan di bagi secara sama rata kepada saudara-saudara perempuan. Dan pembagian ini oleh masing-masing mereka ada yang telah disertifikatkan meskipun bukan atas nama mereka tetapi atas nama suaminya. Alasannya pembagian secara sama rata didasarkan pada keadaan keluarga masing-masing ahli waris yang memerlukan tanah untuk dipakai untuk tinggal dan

³⁵ Wawancara dengan Ibu Wila Ju, ahli waris perempuan, tanggal 18 Agustus 2004

³⁶ Wawancara dengan Bapak Lowe Here, ahli waris laki-laki, tanggal 18 Agustus 2004

berusaha. Karena bila ketentuan hukum adat ini diikuti, akan menimbulkan beban bagi anak laki-laki yang harus menanggung hidup dari kerabatnya.

Dari pengalaman responden di atas nampak bahwa ketetapan adat Sabu yang menganut kekerabatan patrilineal, dan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak wanita bukan ahli waris mulai bergeser atau berubah, dimana anak wanita juga diberikan hak selaku ahli waris. Artinya sistem kekeluargaan patrilineal hanya nampak pada sistem kekerabatannya dan eksogami dalam sistem perkawinannya tetapi sistem pewarisannya bergerak ke arah sistem parental.

4.3. UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM WARIS ADAT SABU DAN PERKEMBANGANNYA

4.3.1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan pada saat masih hidup atau setelah meninggal dunia yang akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.

Di Sabu yang disebut pewaris adalah :

1. Laki-laki (ayah)

Pewaris terbagi atas :

1.a. Pewaris pusaka tinggi, yaitu yang ketika meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, harta warisan dari beberapa generasi ke atas harta nenek moyang “*bara puhaka*”, yang dibedakan menjadi :

1.a.1. Pewaris mayorat laki-laki, selaku penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

1.a.2. Pewaris kolektif laki-laki, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

1.b. Pewaris pusaka rendah, pewaris yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

Hasil Penelitian

Di kecamatan kota Waingapu, keberadaan pewaris mayorat laki-laki dan pewaris kolektif laki-laki tidak nampak didalam kehidupan masyarakat Sabu, karena 90% masyarakat Sabu disana adalah penganut agama Kristen yang tidak lagi menjalankan ritual-

ritual adat yang sangat erat dengan ketetapan-ketetapan adat Sabu. Meskipun masih ada pewaris yang mewariskan harta benda termasuk dalam kategori harta pusaka tinggi.

Yang justru nampak didalam praktek kehidupan masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu adalah pewaris yang dikategorikan sebagai harta pusaka rendah

Analisa

Hal ini terjadi karena pengaruh ajaran agama Kristen yang sangat dominan serta tidak adanya upacara/ritual adat serta tidak adanya harta kekayaan milik bersama (persekutuan adat).

Bahkan dikalangan masyarakat Sabu yang anggota keluarga/kerabatnya telah bersekolah tinggi baik di Kupang, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang Solo, Salatiga, Jakarta, Bandung dan daerah lainnya cenderung berpandangan bahwa kedudukan pewaris itu bukan hanya pada pihak laki-laki saja tetapi perempuan itu juga pewaris. Alasan mereka sekarang ini harta warisan baru dibagi setelah orangtua (ayah dan ibu) meninggal dunia. Memang dari sudut hukum adat Sabu ini suatu hal yang menyimpangi adat, tetapi tidak ada sanksi adat atas penyimpangan ini, dan masyarakat Sabu dalam penguasaan dan pemilikan tanah lebih mengikuti

dilaksanakan akan merugikan mereka sendiri, sedangkan bila menyimpangi hukum adat tidak ada sanksinya. Artinya cara berpikirnya sudah lebih pada perhitungan untung rugi dan sifat kebersamaannya semakin longgar. Meskipun menurut sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dianut berkonsekwensi pewaris adalah pihak laki-laki, tetapi kenyataan yang ditemukan dilapangan/lokasi penelitian menunjukkan bahwa peran pewaris pada masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu terutama di kalangan orang-orang dari lingkungan yang berpendidikan tinggi, pewaris bukan hanya pihak laki-laki tetapi juga pihak perempuan dalam hal ini ibu, karena harta warisan baru dibagi-bagi setelah pewaris ibunya meninggal dunia. Ini merupakan suatu perkembangan dimana perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari kemajuan dibidang pendidikan dan juga komunikasi dan informasi yang dapat diakses dengan cepat turut merubah pola pikir dan pola tidak yang juga mempengaruhi eksistensi hukum waris adat Sabu.

4.3.2. Harta Warisan dalam hukum waris adat Sabu

Harta warisan adalah harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan patrilineal yaitu kepada pihak laki-laki.

Jenis-jenis harta warisan yang ada dalam masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu,

1. Kedudukan / jabatan Adat.

Harta warisan berupa kedudukan / jabatan adat ditentukan oleh tata kehidupan sosial budaya masyarakat Sabu.

Kedudukan/jabatan dalam masyarakat Sabu antara lain ³⁷:

- **“Mone Ama”** (=Yang Bapa) adalah sebuah dewan kepemimpinan kolektif yang mengatur seluruh kehidupan orang Sabu.
- **“Deo Rai”** (=dewa negri) merupakan pemimpin upacara yang tertinggi dan bertanggung jawab memimpin upacara dimusim hujan (usaha tani sawah, lading dan kebun) yang menjaga dan mendiami **“Amu Kepue”** (=rumah induk adat).

³⁷ Tanya, Bernard L, Jurnal Magister Hukum, Vol2 N0.4, Oktober 2000, hal.27.

- ***Do Heleo*** (=pengawas) pembantu utama deo rai yang mengawasi pelaksanaan upacara-upacara dalam negeri. Selain itu juga untuk menemukan peristiwa-peristiwa yang dianggap melanggar "***uku***" (=ketetapan adat) dengan melakukan upacara mengusir bala dan kekuatan negatif lainnya.
- "**Rue**" (=aib) pemimpin upacara yang bertanggung jawab melakukan penghapusan hal-hal yang mencemarkan negeri yang melanggar kesucian uku.
- Pulodo (=dewa matahari) adalah koordinator penghubung antara ***Mone ama*** dengan ***Ana rai*** (=anak negeri =warga) bertugas mengurus kehidupan sehari-hari rakyat dan bertanggung jawab memimpin pengambilan keputusan perihal hubungan antara warga dan juga menyangkut pembinaan warga.
- "**Maukia**" (=panglima) pemimpin upacara menyangkut persoalan politik, seperti mencegah peperangan.
- **Lakia**" (=Malapetaka) pemimpin upacara yang menyangkut kematian tidak wajar atau bencana alam.

- “Raba Dimu” (=Penangkan timur) pemimpin upacara yang berhubungan dengan penolakan atau membendung kemungkinan-kemungkinan masuknya unsur negatif dari luar.

2. Harta pusaka

Harta pusaka dapat dibedakan atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah bila dilihat dari asal usul benda.

2.a. Harta pusaka tinggi yaitu yang tidak dapat dibagi dan mempunyai nilai magis religiu berupa : tempat upacara ritual benda-benda upacara ritual adat, senjata, perhiasan adat, pakaian adat, Yang tidak berujud “*li pana*” (=mantera),.

2.b. Harta pusaka rendah yaitu harta warisan yang dapat dibagi dan tidak punya nilai magis religius, misalnya tanah, sawah, ladang, rumah semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas.

3. Harta Bawaan³⁸

Merupakan harta warisan yang berasal dari bawaan suami (=“*hegai kebolo*”) atau bawaan istri (=“*hegai harru kabala*”)

³⁸ Wawancara dengan Bapak Dule Riwu, Pemuka Adat Sabu, tanggal 19 Agustus 2004

ketika melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak yang berasal dari bagian warisan dari orang tua atau kerabat masing-masing suami dan istri atau hibah atau berupa hibah wasiat dari tetangga, sahabat, yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan mereka. Kesemuanya dipakai untuk kepentingan kehidupan keluarga suami istri dan anak-anak serta orang-orang dalam rumahnya. Kecuali dalam hal terjadi perceraian maka barang bawaan istri dapat dituntut kembali oleh istri hal ini sebagai konsekwensi logis dalam adat Sabu bahwa barang milik/yang dipakai perempuan diberikan kepada perempuan.

4. Harta Pencaharian bersama

Semua harta warisan yang berasal dari penghasilan suami dan istri secara bersama selama perkawinan mereka.

Hasil Penelitian

Menurut responden Ayub Pah³⁹, kedudukan/jabatan adat tidak ada lagi dikalangan masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu. Karena itu sangat erat dengan upacara/ritual adat yang

³⁹ Wawancara dengan bapak Ajub Pah, Pemuka adat Sabu, pada tanggal 14 Agustus 2004

dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang tertentu memiliki kedudukan/ jabatan adat.

Kedudukan/jabatan adat ini di pegang oleh keturunan laki-laki sulung (tertua), bila tidak mempunyai anak laki-laki, kedudukan /jabatan adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua atau saudara laki-laki dari Pewaris dan tidak boleh diteruskan kepada anak perempuan. Harta pusaka tinggi yang sifatnya turun temurun dari nenek moyang kepada keturunan yang masih hidup sekarang. Jenis-jenis harta ini biasanya dalam keadaan tidak terbagi-bagi serta tanggungjawabnya diserahkan kepada anak laki (tertua) atau yang dituakan. Sedangkan harta pusaka rendah biasa dalam bentuk rumah, tanah dan sawah dan bisa dibagi-bagi. Tetapi harta pusaka rendah ini di Sabu sudah banyak diperjual belikan⁴⁰.

Di kecamatan kota Waingapu kedudukan /jabatan dan harta pusaka tinggi tidak ada, sedangkan harta pusaka rendah sudah dalam keadaan terbagi-bagi kepada anak-anak dan kerabat. Dan dalam kenyataannya sudah terbagi-bagi dan menjadi harta bawaan dari anak-anak kedalam perkawinan.

⁴⁰ Kana, Nico L. op.cit, hal. 126

Harta bawaan dan harta pencarian bersama suami istri, dapat diwarisi oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Harta tersebut termasuk dalam harta warisan yang dapat terbagi-bagi, jadi dapat dikuasai dan dikelola secara individual oleh masing-masing ahli waris. Saat ini masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu melakukan pembagian warisan berupa tanah sewaktu pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal kepada anak laki-laki dan perempuan dengan jumlah tidak selalu sama besarnya namun dapat diterima oleh anak-anak.

4.3.3. Ahli Waris

Ahli waris adalah semua orang yang berdasarkan hukum berhak menerima warisan. Dalam hukum waris adat pada umumnya serta pada azasnya adalah keturunan langsung dari pewaris yaitu anak pewaris biasanya disebut ahliwaris utama dan pertama.

Menurut hukum waris adat Sabu ahliwaris adalah anak laki-laki (termasuk anak angkat, anak luar kawin diakui) ahli waris dengan hibah orang tua dari orang tua atau saudara kandung laki-laki dari bapak beserta keturunannya; Bangu udu/Pemuka adat. Artinya dalam garis lurus kebawah maupun dalam garis

menyamping, apabila terdapat adanya ketunggalan leluhur misalnya bapak ibunya sama atau kakek neneknya sama. Dan anak perempuan, janda, anak tiri, anak luar kawin tidak diakui bukan ahli waris. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan atau derajat. Jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat pertama dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat 2 dari kakeknya.

Hasil Penelitian

Menurut hukum adat Sabu di kecamatan kota Waingapu, ahli waris yaitu anak laki-laki beserta keturunannya (dalam praktek anak perempuan juga sebagai ahli waris); Saudara laki-laki beserta keturunannya Orang tua; Orang tua dari orang tua; Saudara dari orang tua beserta keturunannya; Bangu udu/Pemuka adat.

Kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan pertama. Dalam kenyataan tidak sepenuhnya dijalankan.

Ada kecenderungan untuk membagi warisan kepada anak laki-laki dan perempuan berdasarkan pada keputusan pewaris atau musyawarah keluarga. Pergeseran atau perubahan ini terjadi, karena perkebangan didalam masyarakat yang semakin modern

serta melandasi kepentingan pada hukum modern (positif). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kearah persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan perempuan.

Menurut pengalaman responden Ibu Bire⁴¹ bahwa sebagai anak perempuan tertua diantara saudara-saudara yang perempuan, maka menurut adat ia mereka tidak berhak atas warisan atau bukan ahli waris. Meskipun mereka semua telah kawin, tetapi harta warisan peninggalan orang tuanya akhirnya dibagi dalam jumlah yang tidak sama rata ia sebagai anak tertua telah mendapat bagian tanah rumah sedangkan adik-adik mendapat bagian berupa bidang-bidang tanah.

Anak luar kawin tidak diakui (=“*ana do bui pa kepue*”) anak yang lahir dari hubungan ayah dan ibunya bukan dari perkawinan yang sah dan/atau bila kemudian mereka kawin tidak ada pengakuan menurut hukum adat Sabu, pada prinsipnya bukan ahli waris, dan ia hanya berhak mewaris dari keluarga ibunya (kakek). Anak angkat adalah anak orang lain biasanya dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain, yang diangkat sebagai anak. Di lingkungan masyarakat Sabu, kedudukan anak angkat sebagai ahli

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Bire, ahli waris perempuan pada tanggal 19 Agustus 2004

waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta warisan orangtua angkatnya, apabila kemudian ada anak kandung, maka biasanya anak angkat mendapat lebih sedikit dari anak kandung.

Anak tiri adalah anak yang lahir dari istri yang sebelumnya berstatus janda dan sudah mempunyai anak pada perkawinan terdahulu, kemudian menikah lagi dan membawa anak ke dalam perkawinannya yang selanjutnya. Pada prinsipnya anak tiri bukan ahli waris dari bapak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya, ia hanya dimungkinkan memperoleh warisan sesuai dengan kerelaan dari ahli waris yang sah.

Ahli waris dengan hibah wasiat adalah seseorang yang bukan ahli waris, tetapi karena adanya pesan (= "*pe taka li*") dari pewaris semasa hidupnya dapat menerima warisan. Di lingkungan masyarakat Sabu, hal ini dapat terjadi terhadap orang/teman yang berjasa. Pesan ini biasanya diucapkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditentukannya dan disaksikan oleh beberapa anggota keluarganya, terutama para ahli warisnya dan pemuka adat.

Janda pada prinsipnya di lingkungan masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, janda yang ditinggal wafat suaminya, bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Ia hanya

mempunyai hak untuk mengelola dan menikmati harta warisan suaminya.

Hasil Penelitian

Menurut ketentuan adat, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan (pewaris) adalah anak-anaknya laki-laki. Ahli waris utama adalah meliputi semua orang yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam suatu golongan/kelompok, dimana golongan yang lebih utama akan menutup kemungkinan mewaris bagi golongan kedua sesuai dengan ketentuan adat Sabu.

Meskipun menurut hukum adat Sabu anak perempuan dan janda bukan ahli waris, tetapi dalam prakteknya janda dapat menguasai harta warisan dan anak perempuan juga diakui sebagai ahli waris.

Janda hanya dapat menikmati harta peninggalan suaminya sampai ia meninggal dunia, karena sekarang ini sangat jarang sekali seorang janda kembali dan tinggal pada keluarga asalnya, Jika janda mempunyai anak, selain janda itu mempunyai hak untuk menguasai, mengelola serta menikmati hasil dari seluruh harta warisan peninggalan suaminya selama janda itu

membutuhkannya selama hidupnya, dengan batasan dia tidak melakukan perkawinan lagi. Harta warisan baru akan dibagi setelah janda meninggal dunia. Namun didalam kenyataan Janda dan anak perempuan diakui seperti ahli waris seperti dikemukakan oleh reponden Ibu Rohi⁴², beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, mereka sekeluarga mengadakan musyawarah keluarga dengan pemuka adat dalam kerabatnya, camat dan lurah dengan suatu upacara adat. Dalam musyawarah ini telah disepakati, bahwa harta warisan dibagi-bagi kepada anak-anak dan janda. Setelah jelas siapa saja yang menjadi ahli waris yaitu janda (ibu Rohi), dua orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki dan kepada mereka diadakan pembagian warisan dimana janda memperoleh bagian. Dengan demikian janda dan anak-anak perempuan yang semula bukan ahli waris kini diakui sebagai ahli waris dan mendapat bagian warisan.

Analisa

Dari hasil penelitian, yang seharusnya menjadi ahli waris menurut hukum waris adat adalah anak-laki-laki, telah berubah

⁴² Wawancara dengan Ibu Rohi, tanggal 16 Agustus 2004.

karena anak perempuan bahkan jandapun diakui sebagai ahli waris.

4.3.4. Pelaksanaan / proses pembagian warisan

Pelaksanaan / proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat :

1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia / Masih Hidup

a. Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup seringkali pewaris telah melakukan penerusan/pengalihan kedudukan/jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya menurut tata cara hukum ada setempat. Ada pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya kawin atau mendirikan rumah tangga. Pemberian ini untuk anak laki-laki berupa sawah, tanah, rumah, kumpulan pohon lontar, seperangkat alat penyadap nira, hewan piaraan (*“hegai kebolo”*) dan anak perempuan seperangkat alat tenun, perhiasan, hewan piaraan peralatan rumah tangga, (*“hegai haru kabala”*).

b. Cara penunjukkan

Proses pembagian warisan yang dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, pewaris menunjuk kepada ahli waris hak dan kewajiban atas harta tertentu. Perpindahan penguasaan dan kepemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris pada saat si pewaris meninggal dunia.

c. Dengan meninggalkan Pesan atau "*Pe takka li*"

Biasanya pesan ini diucapkan/lisan pada saat pewaris masih hidup dan diucapkan atau (sekarang) dituliskan dengan jelas dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, pemuka adat, camat dan atau aparat kelurahan.

Penetapan Harta Kekayaan semasa pewaris masih hidup dapat berupa⁴² :

- Pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris.

Pewaris dengan dasar tulus ikhlas memberikan kepada anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan (anak angkat, anak tiri) atau kerabat maupun orang lain sewaktu mereka masih hidup. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya (hibah).

⁴² Wawancara dengan Bapak Dule Riwu, tanggal 19 Agustus 2004

- Pemberian sementara dari pewaris kepada ahli waris

Pemberian dari harta warisan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup kepada ahli warisnya. Harta ini hanya untuk dinikmati hasilnya nanti di kemudian hari baru diadakan pembagian warisan yang bersifat tetap, biasanya dipakai untuk bekal hidup bagi keluarga baru.

2. Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Dalam hal pewaris (laki-laki) meninggal dunia, timbul persoalan apakah harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan dibagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Menurut hukum adat Sabu harta warisan jatuh kedalam penguasaan anak laki-laki tertua. Tetapi saat ini pada masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu ada kecenderungan pembagian warisan baru akan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Artinya harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi dan berada dalam penguasaan Janda.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa harta warisan ini pada umumnya terdiri dari harta bawaan suami-istri dan harta pencaharian bersama selama perkawinan mereka, sehingga

apabila pewaris (suami) meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, sepantasnya dikuasai oleh janda, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

Tetapi juga terjadi harta warisan berada dalam penguasaan anak, jika janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan/atau berkeluarga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut. Setelah kedua orangtuanya meninggal baru dibagi kepada ahli waris.

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada saudara laki-laki pewaris, bila sudah tidak ada lagi maka akan dikuasai oleh kerabatnya yang paling dekat. Bila anak-anak telah dewasa dapat dibagikan sesuai dengan kesepakatan keluarga.

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya, demikian juga saudara-saudara laki-laki pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada pemuka adat.

Harta warisan yang diteruskan dalam keadaan terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan.

3. Waktu Pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, akan tetapi menurut adat kebiasaan waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara ada kematian dilaksanakan.

4. Juru Bagi

Orang yang menjadi juru bagi biasanya merupakan anggota keluarga/ kerabat, yaitu : Orangtua yang masih hidup (Janda atau duda pewaris); Anak laki-laki; Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana; Anggota kerabat,

pemuka adat/bangu udu atau orang yang dipilih oleh para ahli waris.

5. Cara Pembagian

Dalam katetapan adat Sabu biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan sifat dari benda atau harta warisan, pada umumnya barang-barang milik perempuan akan diberikan kepada anak perempuan artinya sesuai kebutuhan dari para ahli waris. Sedangkan yang berupa tanah pembagian dengan cara menentukan batas-batas tanahnya, sedangkan hewan dibagikan dengan cara memberikan tanda dengan potongan (=“*hotu*”) ditelinga hewan piaraan atau diberikan cap, tetapi tetap dipelihara dalam kandang yang sama.

4.4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN DALAM HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN SABU DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU

Masyarakat merupakan subyek pendukung hak suatu hukum senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan mulai dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Perubahan dan perkembangan ini membawa perubahan terhadap pola tingkah laku dan cara bertindak dalam setiap relasi sosial yang ada dan

tumbuh didalam masyarakat. Setiap individu akan senantiasa mengadakan relasi dan berinteraksi dengan sesamanya, karena dengan itu setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Oleh karena itu setiap individu harus mampu menyesuaikan dirinya dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan.

Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Perubahan yang disebabkan oleh faktor intern antara lain dapat berasal dari adanya penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan atau inovasi baru, dan sebagainya. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh faktor ekstern adalah dapat berasal dari alam seperti banjir dan kemarau, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hasil penelitian penulis, akan dapat diketengahkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam hukum waris adat Sabu di kecamatan kota Waingapu, khususnya tentang kedudukan hak waris perempuan :

4.3.1. Faktor Migrasi

Bermigrasinya orang-orang Sabu dari daerah asalnya ke Sumba, setelah ditandatanganinya perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1756⁴³. Juga karena ekologi Sabu yang kering dan gersang menjadi faktor penting yang menyebabkan migrasi keluar orang-orang Sabu dalam skala besar⁴⁴. Akibat migrasi orang-orang Sabu maka keterikatan akan adat kebiasaan menjadi lebih longgar, seperti yang ditulis oleh Fox⁴⁵ *“Setelah pindah ke Sumba tidak mungkin bagi mereka untuk menciptakan susunan kependetaan atau melaksanakan upacara-upacara sesuai dengan perputaran bulan. Banyak orang Sabu yang sudah benar-benar melepaskan diri dari upacara-upacara adat keagamaan itu. Kebudayaan Sabu yang berkembang di Sumba tidak mempunyai dasar keupacaraan utama seperti di pulaunya. Para pendatang dari Sawu adalah orang Kristen yang teguh yang menyatakan telah memutuskan diri dari kampung halamannya”*.

Kemudian lebih banyak lagi orang-orang Sabu yang keluar ke Kupang, Surabaya, Jakarta Denpasar, dan daerah lainnya untuk

⁴³ Kana, Nico L. op.cit, hal 19

⁴⁴ Cornelis Lay, op.cit. hal 138,143

⁴⁵ Fox, J. James, Panen Lontar, hal. 232

mencari alternatif kehidupan yang lebih baik. Dari sini orang-orang Sabu mulai berinteraksi dengan berbagai macam suku dan budaya yang kemudian membuat mereka berpikir dan bertindak rasional dan maju..

4.3.2. Pendidikan

Bermigrasi orang-orang Sabu karena didorong oleh “keinginan untuk memperoleh pendidikan yang lebih lanjut dan memperoleh pekerjaan setelah selesai⁴⁶. Setelah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh pekerjaan dan profesi baik sebagai dosen, pendeta, guru, tentara, polisi hakim, jaksa, pengacara, dokter dan lain sebagainya. Profesi sebagai pendidik yang paling banyak berperan dalam menimbulkan kesadaran bagi perempuan Sabu tentang hak dan kedudukan mereka didepan hukum. Karena dari kalangan profesi merekalah banyak disuarakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Arus informasi yang dengan mudah dan cepat diakses terutama yang menyuarakan kesetaraan gender merupakan acuan bagi orang-orang Sabu untuk

⁴⁶ Fox, J.James,. ibid.hal. 234

memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya hak sebagai ahli waris.

4.3.3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berperan terhadap perubahan sikap hidup dan relasi sosial orang-orang Sabu. Kalau dahulu hubungan kekeluargaan yang begitu dekat dan erat, kini tampak semakin longgar. Kegiatan ekonomi yang begitu dominan dalam kehidupan masyarakat kota Waingapu, semakin mamacu individu untuk bersaing meningkatkan kemampuan ekonomi dengan penguasaan atas asset-aset yang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini telah menimbulkan keinginan pada anak-anak perempuan Sabu untuk ikut didalam persaingan ini tetapi juga menyadarkan mereka adanya diskriminasi perlakuan dalam sistim pewarisan menurut hukum adat Sabu. Kondisi ini membuat anak perempuan tidak maju, sehingga perlu di reformasi. Agar supaya lebih membuka kesempatan bagi perempuan Sabu dalam pembangunan seperti yang telah dicapai oleh kaum perempuan di pulau Jawa. Kaum perempuan sudah

banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah, hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Berbagai macam kesempatan kerja ini kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan. Hal inilah yang turut pula mempengaruhi perkembangan pemikiran bagi perempuan Sabu untuk dapat ikut serta dalam berusaha. Didalam untuk membuka usaha diperlukan modal dan untuk mendapatkan modal dapat diperoleh dari lembaga keuangan seperti Bank ataupun lembaga keuangan non bank, modal dapat diperoleh apabila ada jaminan, dan biasanya jaminan ini berupa tanah.

Responden Diana Pe⁴⁷ adalah salah satu dari lima bersaudara yang semuanya perempuan, orangtuanya pengusaha. Menurut hukum adat mereka tidak berhak mewaris. Tetapi karena mereka semua lulusan perguruan tinggi di Surabaya dan Malang, mereka merasa tidak adil, bila harta kekayaan orangtuanya jatuh ketangan saudara laki-laki bapaknya, dan bertentangan rasa keadilan mereka. Akhirnya harta warisan orangtuanya dibagikan kepada

⁴⁷ Wawancara dengan Diana Pe, Ahliwaris perempuan, pada tanggal 14 Agustus 2004

seluruh ahli waris secara sama rata, tanpa di gugat oleh saudara laki-laki bapaknya yang menurut hukum adat Sabu lebih berhak.

4.3.5 Faktor Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata faktor agama turut berperan didalam perubahan atau pergeseran dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Sabu. Menurut ajaran agama Kristen bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sepadan oleh karena itu telah pula menimbulkan kesadaran pada orang-orang Sabu untuk memberikan kedudukan ahli waris kepada anak perempuannya dengan bagian yang sama banyak. Kedudukan mana telah dikongkritkan dalam kehadiran perempuan Sabu yang telah menjadi pemimpin jemaat di gereja-gereja yang semula hanya didominasi oleh kaum laki-laki.

Analisa

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris perempuan Masyarakat Sabu antara lain : faktor migrasi, pendidikan, ekonomi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat Sabu. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah

tidak sulit dijumpai adanya anak perempuan sebagai ahli waris. Meskipun dalam prakteknya bagian warisan yang diterima oleh anak perempuan tidak selalu sama besarnya dengan bagian anak laki-laki, tetapi dirasakan adil oleh para ahli waris tersebut.

4.4. Penyelesaian Sengketa dalam Waris Adat Masyarakat Sabu kecamatan Kota Waingapu

4.4.1. Musyawarah Keluarga

Bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Sabu dapat menimbulkan perselisihan dan sengketa. Akibat adanya pihak yang tidak puas dengan hasil pembagian yang diterimanya atau karena tidak mendapatkan bagian dari warisan itu. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain. Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perselisihan/sengketa yang terjadi adalah karena anak perempuan merasa tidak

puas sebab tidak mendapat bagian warisan tanah. Seperti pengalaman yang dialami oleh responden Medo Rohi⁴⁸. Harta peninggalan orangtuanya berupa tanah yang cukup luas tetapi diterlantarkan, karena saudara laki-laki tidak mengelola tanah tersebut, sedangkan ia sendiri hidup kekurangan. Maka merasa memiliki berhak atas tanah tersebut, maka menuntut pada saudara untuk membagi harta warisan dengan saudaranya. Akhirnya melalui musyawarah keluarga, disepakati pembagian tanah antara mereka dengan bagian yang tidak sama besarnya.

Di Masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu pada dua tahun terakhir ini cukup banyak perselisihan dan sengketa warisan. Camat kota Waingapu ada menangani sekitar 80 (delapan puluh) perselisihan/sengketa warisan yang minta diselesaikan secara musyawarah keluarga yang juga melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan. 20 (duapuluh) perselisihan terjadi antara pihak-pihak dari etnis Sabu.⁴⁹ Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga dimana kehadiran aparat kecamatan dan kelurahan hanyalah sebatas pihak yang menyaksikan. Yang menjadi pemimpin dari

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Medo Rohi, ahli waris perempuan pada tanggal 14 Agustus 2004

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Marthen UZ W, Camat Kota Waingapu, tanggal 19 Agustus 2004

musyawarah tersebut adalah kerabat laki-laki dari pihak ayah yang di-tuakan yang dianggap bijaksana oleh keluarga tersebut.,

Pada masyarakat Sabu, menurut Haba⁵⁰ sebagai contoh yang terjadi dalam keluarganya, penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh saudara-saudara laki-lakinya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang di-tuakan. Setelah diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dari sengketa dilanjutkan dengan pembagian harta warisan dibagi dalam bagian tidak harus sama rata antara laki-laki dan perempuan dan juga kepada kerabat yang menurut adat Sabu mempunyai hak waris tetapi pembagian yang dapat tetap mempertahankan ikatan kekeluargaan dan diterima oleh seluruh ahli waris.

1.2. Musyawarah Adat

Menurut Bapak Ayub Pah⁵¹, bila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Mone Ama atau orang yang dituakan dalam adat Masyarakat Sabu. Dalam penelitian

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Haba, Ahli waris laki-laki pada tanggal 18 Agustus 2004

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ajub Aju Pah, Pemuka Adat Sabu tanggal 14 Agustus 2004

yang penulis lakukan di Kecamatan Kota Waingapu dalam penyelesaian sengketa ini, maka juga dilibatkan aparat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya penyelesaian dengan cara ini sangat baik bagi orang-orang Sabu yang bersengketa, karena dengan kehadiran Mone Ama ketentuan adat turut berperan juga kehadiran aparat pemerintah daerah (Camat dan Lurah) akan mempertegas isi atau hasil musyawarah adat ini.

Menurut Marthen UZ Wolagole, SH⁵², kehadiran camat dan aparat kelurahan dalam penyelesaian sengketa ini sangat berarti, karena kepada para pihak yang berselisih ini diberikan penjelasan tentang kedudukan dari setiap pihak yang berselisih terhadap harta warisan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan untuk berdamai.

Dalam kasus-kasus telah selesai anak perempuan mendapat bagian dari harta warisan peninggalan orang tua bersama dengan saudara laki-laki ayahnya meskipun dengan jumlah yang tidak selalu sama besarnya tetapi dapat diterima dan adil bagi

⁵² Wawancara dengan Bapak Marthen UZ Wolagole, Camat Kota Waingapu, tanggal 19 Agustus 2004

pihak-pihak tersebut. Bahwa kebanyakan pihak kerabat yang berdasarkan hukum waris adat berkedudukan sebagai ahli waris.

Adapula perkara sengketa warisan yang sampai pada tahap jawab-jinawab telah dicabut oleh penggugat dan menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan musyawarah adat. Penyelesaian dengan musyawarah adat yang juga melibatkan hakim selaku mediator yang dapat memberikan arahan agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Tercapainya perdamaian ditandai upacara adat yang dianggap sebagai pengesahannya. Hasil perdamaian ini ternyata lebih efektif dan efisien. Dari pengalaman ini Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dalam seminar tentang efektifitas lembaga mediasi, memberikan usulan agar dalam penyelesaian sengketa perdata untuk perkara menyangkut adat maka Pemuka adat juga dilibatkan sebagai mediator, tidak hanya hakim karena peranan Pemuka adat sangat penting dalam penyelesaian sengketa dan juga pemulihan hubungan social yang telah ternoda oleh perselisihan dan sengketa.

Keputusan perdamaian yang dicapai dalam musyawarah adat ini kemudian dapat dijadikan alas hak bagi pihak yang bersengketa

dalam pengurusan sertifikat tanah atas namanya melalui Notaris/PPAT ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa dari keterangan yang penulis peroleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba timur bahwa ada anak perempuan Sabu yang memperoleh tanah dari orang tuanya yang berasal warisan sesuai dengan hasil penelusuran riwayat tanah yang kemudian dibuat kan sertifikatnya. Seperti di kemukakan reponden Ati Galla seorang staf pada Kantor Badan Pertanahan yang juga memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya (ayah).

Menurut penulis banyak perselisihan / sengketa tanah warisan di kalangan etnis Sabu di kecamatan kota Waingapu, saat ini penyelesaiannya lebih banyak dilakukan dengan cara musyawarah keluarga, karena menurut responden penyelesaian sengketa dengan cara ini lebih efektif dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga, terutama kehidupan anak perempuan lebih terlindungi.

Karena memang sudah semakin disadari bahwa alasan mendasar anak perempuan tidak mewaris, tanah karena di pulau Sabu tanah yang ada adalah tanah milik adat dan tidak bisa jatuh keluar dari kekuasaan persekutuan adat karena tanah sebagai

identitas kerabat. Sedangkan di kecamatan kota Waingapu tidak ada tanah adat. Maka menurut penulis tindakan dari orangtua yang memberikan warisan kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan adalah lebih maju dan lebih tepat dan sesuai dengan pembangunan dibidang hukum yang memperjuangkan kesetaraan hak.

1.3. Secara Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Perselisihan atau sengketa pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga ataupun musyawarah adat, pada akhir dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Bapak Cokro Casmita, SH⁵³, Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 22 Agustus 2004, bahwa di Pengadilan Negeri Waingapu dalam sengketa warisan yang diajukan ke Pengadilan ada 2 kasus yang telah diputus. Perkara No.11/Pdt/G/99/PN.WGP jo No.110/Pdt/1999/PTK jo.No.3748K /Pdt/2000. antara Adriana Bigi Manu, Adriana Piga Manu, Bernese Bella Manu melawan Abner Welem, Laga Welem, Agustinus Welem dan Rame Welem.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Cokro Casmita, Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 22 Agustus 2004

Dalam perkara ini pihak penggugat adalah perempuan melawan pihak tergugat (laki-laki) dengan obyek perkara adalah tanah warisan tanah warisan. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 September 2000 yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak penggugat ditolak atau pihak penggugat dikalahkan.

Dan perkara No. 13/Pdt/G/2003/PN.WGP, yang telah diputus pada tanggal 28 Februari 2004.

Pihak penggugat adalah Agustinus Welem Lay melawan Nyonya Bangu-Tawa Cs. Penggugat adalah saudara laki-laki dari almarhum suami tergugat yang menggugat atas hak dimiliki berdasarkan hukum waris adat, tetapi oleh hakim pengadilan negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan gugatan ditolak, dan menyatakan Ibu Bangu-Tawa, Cs berhak atas tanah warisan tersebut. Karena putusan tersebut tidak disbanding, maka sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya ada pengakuan bahwa perempuan adalah ahli waris dari pewaris dan ayah dari anak-anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan. Dari kedua kasus di atas penulis ingin katakan bahwa sengketa tanah waris antara anak perempuan dan ahli waris laki-

laki menjadi bagian dari pergeseran/perubahan terhadap hukum waris adat Sabu yang hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris.

Oleh karena itu di dalam memutuskan perkara adat, menurut hukum adat haruslah diperhatikan 4 hal yaitu⁵⁴

- a. Mengetahui (menguasai) tentang sistim / susunan hukum adat.

Disini penting bagi hakim sendiri untuk mempelajari hukum adat dan mengetahui seluk beluk hukum adat itu untuk mengadili dan memutuskan mengenai perkara adat, terlebih-lebih sebagai tuntutan zaman dimana diperlukan suatu pengetahuan yang sempurna tentang sistem hukum adat pada umumnya dan menguasai hukum adat setempat.

- b. Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat.

Masyarakat adalah sesuatu yang dinamis senantiasa berkembang dan maju maka harus diperhatikan dan melihat perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab sesuai dengan teori sosiologi pada umumnya, dengan berubahnya masyarakat itu, maka akan berubah pula kesadaran hukum dan norma-norma hukum (nilai-nilai).

⁵⁴ Bushar Muhammad, Azas-azas Hukum Adat, 1978, hal. 233

- c. Asas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kasus yang sedang dihadapi.

Hakim dalam mempraktekkan hukum adat dalam pengadilan haruslah selalu dituntun oleh jiwa yang adil dan pantas menurut perasaan dimana kenyataan yang sedang dihadapi itu berlaku. Dengan demikian perasaan keadilan dan perikemanusiaan dari hakim sendiri adalah juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan untuk memutuskan perkara yang dihadapinya.

- d. Memperhatikan putusan-putusan yang terdahulu (yurisprudensi).

Seorang hakim adat sebagai yurist yang hidup dalam dunia hukum yang tidak tertulis (yang berdasarkan kebiasaan) harus memperhatikan hal-hal positif berupa putusan-putusan hakim yang terdahulu baik hakim yang sederajat maupun hakim yang lebih tua dan terlebih hakim yang di dalam kedudukannya yang lebih tinggi.

Disamping 4 (empat) hal tersebut di atas penyelesaian sengketa warisan sampai ke pengadilan yang diajukan atas dasar perbedaan hak antara anak laki-laki (pihak laki-laki) dengan anak perempuan

(pihak perempuan), maka dapat mengacu kepada yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Adapun Yurisprudensi yang dimaksud antara lain :

Yurisprudensi dari masyarakat hukum adat patrilineal⁵⁵

Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1985 No. 2662 K/Pdt/ 1984 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Selong jo Pengadilan Tinggi NTB yang menentukan bahwa masyarakat Adat Sasak di Lombok telah mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, berbagai jabatan dan profesi telah diisi oleh kaum perempuan suku Sasak ini. Bahwa hukum waris adat yang tradisional telah usang dan ketinggalan jaman tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman modern- tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Bahwa hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram ternyata pada masyarakat Adat Sasak di Lombok timur telah terjadi perseseran nilai hukum adat waris tentang kedudukan anak perempuan, yang semula anak perempuan tidak berhak mewaris tanah sawah, melainkan hanya berhak atas barang bergerak; perhiasan saja (pesangu); sekarang telah berkembang kearah

⁵⁵ Ali Boediarso, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Waris, hal.15

mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya bersama-sama dengan saudara-saudara laki-lakinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/ 1961 tanggal 23 Oktober 1961⁵⁶:

Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

Hukum adat di daerah Padang sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (laki-laki dan perempuan) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak perempuan merupakan “serah lepas” dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya

⁵⁶ IGN Sugangga, op.cit hal.72

tidak mengakui hak mewaris bagi anak perempuan. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

BAB V

PENUTUP

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Dalam lingkungan masyarakat ada Sabu di kecamatan kota Waingapu menganut sistem kekerabatan patrilineal dan sistem perkawinan Eksogami serta bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur (=“kenoto”). Konsekwensinya adalah bahwa sistem pembagian warisan yang hanya kepada anak laki-laki atau pihak laki-laki saja selaku ahli waris. Anak perempuan dalam masyarakat Sabu bukan ahli waris. Tetapi dalam prakteknya anak perempuan atau pihak perempuan saat ini mendapat bagian warisan atau diakui secara sebagai ahli waris.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran atau perubahan serta perkembangan dalam hak mewaris anak perempuan dalam hukum waris adat Sabu di kecamatan kota Waingapu adalah karena ada perubahan dalam didalam masyarakat, yang antara lain adalah faktor

...

Migrasi, Pendidikan dan faktor ekonomi serta faktor agama.

3. Dalam hal terjadi perselisihan pembagian warisan antara anak laki-laki atau pihak laki-laki dengan anak perempuan atau pihak perempuan maka cara penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah pertama dengan cara musyawarah keluarga, kedua musyawarah adat (cara yang banyak dipergunakan) dan ketiga menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

5.2. SARAN

1. Berdasarkan pada kenyataan bahwa pada masyarakat Sabu di kecamatan kota Waingapu pewaris yang melakukan pembagian warisan kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan artinya memberikan kedudukan yang sama, maka hal ini perlu diformalkan dan ditegaskan bahwa anak perempuan adalah ahli waris.
2. Bahwa jumlah bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan ditentukan tetap berdasarkan musyawarah dan mufakat.

3. Bahwa bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan kiranya diikuti dengan pembuatan suatu berita acara perdamaian/akta perdamaian yang disaksikan oleh para pihak dan aparat kecamatan dan kelurahan maupun pihak-pihak yang berkompeten lainnya. Hal ini menjadi penting karena sengketa warisan dalam masyarakat adat Sabu biasanya melibatkan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,
Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Anggraeni, Silvia Asih, East Sumba A Hidden Treasure In The
Archipelago, Mater Printing, 2002
- Biasane, Soleman, Dasar dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat,
Bandung, 1981.
- Boediarto, Ali, Kompilasi Abstraksi Hukum Putusan Mahkamah
Agung tentang Hukum Waris, Ikahi, Jakarta, 1986
- Dellyana, Shanti, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty,
Yogyakarta, 1988
- Dherana, Tjokorda Raka, Sekilas tentang hukum adat dan Kebudayaan,
Universitas Udayana, Denpasar, 1979.
- Djojodigoena, Azas-azas Hukum Adat, GajahMada, Yogyakarta, 1980
- Effendi, Ziwari, Hukum Adat Ambon Lease, Pradnya Paramita, Jakarta,
1987
- Fox, James J Harvest of The Palm (Panen Lontar Perubahan ekologi
dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu.
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995.

Hadikusuma, Hilaman, Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung,
Jakarta, 1987.

-----, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan
Hukum Adat, Hukum Agama, Hukum Islam, Citra Aditya,
Bandung, 1991

Hamit, AT, Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian tentang
Hukum (Acara) Perdata), Bina Ilmu, Surabaya, 1983

Lay, Cornelis, Kisah Dari Kampung, Dian Interfidei, Yogyakarta, 1996

Kana, Nico L, Dunia Orang Sawu, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Kapita, Oe.H, Sumba Di Dalam Jangkauan Jaman, Gereja Kristen
Sumba, 1976

Kaho, Robert, Riwu, Orang Sabu dan Budaya, Panitia Sidang Sinode,
GMIT, 2000

Muhammad, Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat, CV. Muliasari,
Jakarta, 1965

Oemarsalim, Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, 1989

Salyo, Suwarni, Kedudukan Wanita Sebagai Ahli Waris, Dep Keh,
1991

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey,
LP3ES, Jakarta, 1987

- Sugangga, IGN, Pengantar Hukum Adat, Universitas Diponegoro, 1994
- _____, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, 1995
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, Universitas
Indonesia, Jakarta 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Pengantar Penelitian Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983
- Soeripto, Hukum Adat Bali, Universitas Jember, 1979
- Soenggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002
- Tanya, Bernard L., Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 4 Oktober
2000, Program Pasca Sarjana UII – Yogyakarta
- Ter Haar, Bzn, Terjemahan K.Ng.Soebakti Poepanoto, Azas-azas dan
Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Wignyodipura, Soerojo, Pengantar dan Azas Hukum Adat, Gunung
Agung, Jakarta, 1995